

OPTIMALISASI SUMBER DAYA ALAM MENUJU PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN

Mayasuri Presilla

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Jl. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan

Abstract: A border region is a leading point of one country against another country. The border region needs special attention and priority from central as well as local governments as there are considerable issues surround it. One crucial thing that should be the main focus in the border region is the issue of economic development and local communities' welfare. Data used in this paper is mainly based on the field research in Nunukan District, East Kalimantan Province in 2010. The discussion in this paper is emphasized on the development of local natural resources for achieving economic development and the welfare of local people in Nunukan District.

Abstrak: Daerah perbatasan adalah hal yang terpenting dari suatu negara yang memisahkan dengan Negara lainnya. Daerah perbatasan membutuhkan perhatian dan prioritas khusus dari pemerintah pusat dan daerah tentang berbagai isu yang berhubungan dengan masalah wilayah perbatasan. Salah satu hal yang krusial yang menjadi fokus utamadi wilayah perbatasan adalah masalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Data yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan di Kecamatan Nunukan, Kalimantan Timur tahun 2010. Tulisan ini membahas tentang pentingnya pembangunan sumber daya alam daerah untuk mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal di Kecamatan Nunukan.

Kata Kunci: Sumber daya alam, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, wilayah perbatasan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak titik perbatasan dengan negara lain. Perbatasan adalah suatu garis yang memisahkan dua wilayah pemerintahan atau lebih yang memiliki kekuatan yuridiksi. Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan suatu negara yang berhadapan langsung dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, wilayah perbatasan merupakan wilayah yang memiliki nilai yang sangat strategis dalam berbagai hal, misalnya dalam hal perdagangan. Tidak diragukan lagi bila pembangunan di wilayah perbatasan adalah penting dan harus menjadi perhatian dan prioritas utama bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kesadaran mengenai pentingnya mengembangkan wilayah perbatasan sebenarnya sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Secara teori, konsep dasar yang dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan wilayah

perbatasan dapat dilihat dalam berbagai Peraturan Presiden dan undang-undang, misalnya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) 2004-2009 yang menyatakan bahwa wilayah perbatasan adalah salah satu sasaran pembangunan nasional dengan sistem 'wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis' (Hadi, 2010: 4). Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2005 dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 juga secara jelas menyatakan bahwa pengembangan wilayah perbatasan adalah prioritas utama dari pelaksanaan pembangunan nasional karena berbagai alasan, yaitu untuk menjamin kedaulatan dan ketahanan negara, memberikan keuntungan bagi pemerintah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi yang tersedia di wilayah perbatasan (Hadi, 2010:4). Presiden RI pada tahun yang sama juga

mengeluarkan Peraturan Presiden No. 78 yang mengatur pengelolaan pulau-pulau kecil terluar demi stabilitas negara dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut hingga saat ini belum dapat menyelesaikan segudang masalah serius di wilayah perbatasan di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Eddy Suratman (Borneo Tribune, 2010), yaitu ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ketertinggalan pembangunan, sulit terjangkau, keterbatasan infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, dan kurang optimalnya pengembangan sumber daya alam (SDA).

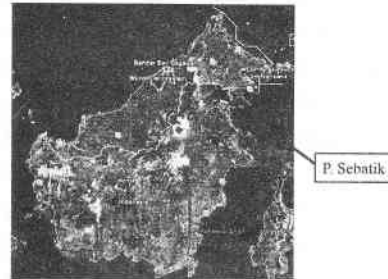
Untuk melihat lebih dalam mengenai masalah pembangunan di wilayah perbatasan, tulisan ini mengangkat kasus wilayah perbatasan di sebelah utara Indonesia, yaitu Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan ditekankan pada pengembangan potensi SDA di sektor pertanian karena pertanian merupakan sektor primer yang menjadi tumpuan mayoritas masyarakat setempat.

POTENSI SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN NUNUKAN

Pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan merupakan isu lama yang selalu menjadi wacana yang hangat untuk diperbincangkan. Isu pengembangan wilayah perbatasan di Indonesia salah satunya dapat ditelaah dengan melihat kondisi riil wilayah perbatasan, dalam hal ini di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan yang terletak di Pulau Kalimantan adalah satu dari empat kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia (lihat Gambar 1 dan Gambar 2). Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 14.263,68 km² atau 7,06% dari total luas Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, 2009: 4). Kabupaten ini terdiri atas delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebuk, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Sebatik Barat.

Wilayah perbatasan ini tidak hanya ada di daratan Pulau Kalimantan, tetapi juga di Pulau Sebatik, yaitu pulau kecil yang berada di sebelah

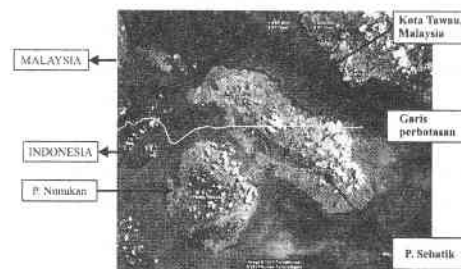
barat Kabupaten Nunukan daratan. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada Gambar 1, tanda panah merah menunjukkan posisi Pulau Sebatik di Pulau Kalimantan, sedangkan Gambar 3 memperlihatkan Pulau Sebatik yang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah utara milik Malaysia, sedangkan wilayah selatannya milik Indonesia.



Gambar 1. Peta Pulau Kalimantan (Sumber, Google map)



Gambar 2. Peta Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Sumber, Google Map)



Gambar 3. Peta Pulau Sebatik (Sumber, Google Map)

Kabupaten Nunukan memiliki berbagai SDA yang potensial untuk dikembangkan. Bappeda Kabupaten Nunukan pada tahun 2009 mencatat bahwa potensi SDA yang dimiliki oleh kabupaten ini adalah sumber daya hutan, lahan, dan mineral (Bappeda Kabupaten Nunukan, 2009: 9). Potensi SDA inilah yang kemudian dipakai untuk

membangun perekonomian daerah dengan berbagai kegiatan di bidang kehutanan, pertanian, dan pertambangan. Sektor perekonomian lain yang menumpu pembangunan ekonomi di Kabupaten Nunukan adalah sektor perdagangan dan jasa (Sari, 2009).

Di antara ke empat sektor unggulan tersebut di atas, sektor pertambangan menempati urutan pertama sebagai sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Nunukan, yaitu sebesar 52% pada tahun 2007. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik setempat pada tahun 2008, hasil utama pertambangan yang dihasilkan oleh daerah ini adalah minyak bumi, yang kemudian disusul oleh batu bara, pasir, dan bahan galiannya. Sektor pertanian menempati posisi kedua dengan sumbangan sebesar 25%. Sektor ketiga penyumbang pendapatan daerah terbesar adalah sektor perdagangan dan jasa dengan sumbangan masing-masing sebesar 12% dan 5%. Perdagangan yang dikembangkan masuk ke dalam kategori perdagangan internasional karena telah melibatkan negara lain, yaitu Malaysia. Sementara itu, hotel dan restoran merupakan dua jenis kegiatan jasa yang banyak dikembangkan di kabupaten ini.

PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN NUNUKAN MELALUI KEGIATAN DI SEKTOR PERTANIAN

Dari ketiga jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Nunukan, sektor pertanian merupakan sektor primer bagi penduduk setempat karena paling banyak menyerap tenaga kerja. BPS Kabupaten Nunukan pada tahun 2008 mencatat bahwa sektor pertanian berhasil menyerap 54,60% penduduk, sedangkan penyerapan tenaga kerja oleh sektor jasa hanya mencakup 20,28% dan sektor perdagangan 10,06% (dikutip oleh Sari, 2009). Sementara itu, walaupun sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah, sektor ini tidak banyak berperan dalam hal penyerapan tenaga kerja karena didominasi oleh pihak swasta sehingga hanya melibatkan sedikit tenaga kerja setempat. Dengan demikian, sektor ini tidak dapat dijadikan sektor tumpuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Sektor pertanian di Kabupaten Nunukan meliputi beberapa kegiatan, yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan (Pemda Kab. Nunukan, 2009:133).

Pertanian Tanaman Pangan

Kegiatan pertanian di Kabupaten Nunukan banyak didominasi oleh pertanian tanaman pangan. Seperti di daerah lainnya di Indonesia, beras merupakan pangan utama di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, tidaklah heran bila pertanian padi merupakan pertanian utama yang diusahakan di kabupaten ini, baik dalam bentuk sawah maupun ladang. Namun, jumlah produksi beras setiap kecamatan berbeda. Di antara delapan kecamatan di kabupaten ini, terdapat dua kecamatan yang mengalami kekurangan beras, yaitu Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebuku; sedangkan enam kecamatan lainnya telah mencapai surplus beras.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nunukan 2009, penanaman dan produksi padi banyak dihasilkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan, yaitu Kecamatan Krayan, Sebatik, dan Nunukan. Kecamatan Krayan pada tahun 2008 memproduksi sebanyak 11.299 ton beras atau 30% dari total produksi di Kabupaten Nunukan; sedangkan produksi beras di Kecamatan Nunukan adalah 7.228 ton (19%) dan Kecamatan Sebatik sebanyak 7.372 ton (19%) (Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, 2009: 136 dan 140; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, 2009: 55). Rata-rata produksi beras untuk 1 ha sawah di Kabupaten Nunukan mencapai 2,5-3,5 ton untuk sekali panen. Untuk mengairi sawah, masyarakat mempercayakannya kepada 'mekanisme alam', yaitu pada besarnya curah hujan yang berlangsung sepanjang tahun. Sistem tadah hujan adalah sistem yang dipakai untuk mengairi sawah-sawah pertanian padi masyarakat setempat.

Perkebunan

Selain tanaman pangan, subsektor perkebunan merupakan kegiatan pertanian nomor dua yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Tanaman utama yang dikembangkan dalam kegiatan perkebunan adalah kakao dan kelapa sawit.

Tanaman Kakao

Tanaman kakao atau koko (dalam bahasa Malaysia) lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai tanaman coklat. Dari pengolahan biji kakao ini dapat diperoleh berbagai jenis makanan atau minuman. Tanaman kakao merupakan tanaman yang berasal dari Sabah, Malaysia. Sejak dikembangkan pada tahun 1950-an di Sabah, penyebaran tanaman ini meluas hingga ke Tawau, Sandakan, dan Kudat. Perjalanan tanaman kakao ini pun akhirnya sampai juga ke wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan, dan Kabupaten Nunukan adalah salah satunya.

Dari tahun ke tahun luas perkebunan kakao dan jumlah produksinya mengalami peningkatan. Luas perkebunan kakao beserta jumlah produksinya per kecamatan di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 1. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Sebatik merupakan kecamatan yang memiliki perkebunan kakao yang cukup luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang juga membudidayakan tanaman kakao. Luas perkebunan di Kecamatan Sebatik mencapai 11.143 ha dengan hasil produksi sebanyak 17.500 ton pada tahun 2007. Menurut sejarahnya, perkebunan kakao di Kecamatan Sebatik sudah diusahakan semenjak kurang lebih 30 tahun yang lalu. Pada saat itu lahan pertanian bukanlah kendala besar karena setiap orang di Pulau Sebatik dapat memiliki lahan sesuai dengan kemampuan mereka untuk membuka lahan. Oleh karena itu, para pendatang yang pertama kali datang ke Pulau Sebatik memiliki lahan yang luas.

Penanaman pohon kakao di Kecamatan Sebatik dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, tentu saja pengaruh yang kuat dari Malaysia karena Kecamatan Sebatik merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya dengan Tawau (lihat kembali Gambar 3). *Kedua*, adalah banyaknya lahan perkebunan kakao di Tawau yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah produksi kakao di Malaysia sehingga meningkatkan permintaan kakao dari Indonesia. Dengan demikian, banyak masyarakat di Kecamatan Sebatik yang mengusahakan perkebunan kakao. Mengapa banyak kakao dari kecamatan ini yang dijual ke Tawau? Hal ini didasarkan atas dua hal, *pertama*, jaraknya dekat sehingga tidak memerlukan waktu dan biaya yang terlalu besar. *Kedua*, karena tidak ada pabrik

pengolahan biji kakao di Sebatik sebagaimana banyak terdapat di Tawau.

Tabel 1. Luas Areal (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Kakao Kabupaten Nunukan Tahun 2007 (Sumber, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Nunukan, 2008).

Kecamatan	Lahan Kakao (Ha)	Produksi Kakao (Ton)
Krayan	-	-
Krayan Selatan	-	-
Lumbis	576,00	425,00
Sembakung	303,00	177,00
Nunukan	1.010,00	800,00
Sebuku	6,00	1,10
Sebatik	11.143,00	17.500,00
Sebatik Barat		
Jumlah	13.038,00	18.903,10
2006	13.038,30	17.702,00
2005	12.659,0	17.073,35
2004	11.122,0	15.889,60
2003	10.107,0	13.592,30
2002	8.053,0	15.257,35
2001	7.107,0	15.255,70
2000	7.575,0	3.461,05

Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang sangat strategis karena berorientasi ekspor dan memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi kemiskinan. Selain keuntungan finansial, keuntungan lain dari perkebunan kelapa sawit adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, misalnya saja untuk lima juta hektar perkebunan kelapa sawit dibutuhkan 2 juta pekerja (Sari, 2009). Dengan demikian, tidak diragukan lagi bila Pemda Provinsi Kalimantan Timur berusaha keras mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang luas guna mempercepat pembangunan kawasan dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan.

Sosialisasi Pemda Provinsi Kalimantan Timur ke masyarakat untuk melakukan penanaman kelapa sawit boleh dikatakan cukup berhasil. Luas areal perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Misalnya saja peningkatan sebesar 25,4% terjadi hanya dalam jangka waktu satu tahun, yaitu dari 34.217,5 ha pada tahun 2006 menjadi 42.907,14 ha pada tahun 2007 (lihat Tabel 2). Beberapa kecamatan yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan adalah Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Sebatik Barat.

Tabel 2. Luas Areal (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Kelapa Sawit Kabupaten Nunukan Tahun 2007 (Sumber, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, 2008)

Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi Kakao (Ton)
Krayan	-	-
Krayan Selatan	-	-
Lumbis	400,00	-
Sembakung	1.000,00	-
Nunukan	23.001,00	16.486,03
Sebuku	16.728,14	620.620,00
Sebatik	900,00	0,06
Sebatik Barat	878,00	-
Jumlah	42.907,14	637.106,09
2006	34.217,50	10,50
2005	30.155,7	1.600,00
2004	22.961,0	-

Berkebun kelapa sawit tidaklah mudah dan sangat memerlukan biaya yang besar. Untuk itu, Pemda Kabupaten Nunukan tidak segan-segan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memotivasi mereka membuka perkebunan kelapa sawit, seperti bibit kelapa sawit, uang sebesar Rp 2 juta per orang, pupuk, dan ongkos tanam. Untuk 1 ha lahan akan mendapatkan sebanyak 130 bibit kelapa sawit. Ini cukup membantu petani karena 1 bibit kelapa sawit di pasaran dihargai Rp 25.000. Namun, untuk mendapatkan bantuan dari pemda ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu membentuk satu kelompok tani yang terdiri atas 15 orang dan masing-masing orang di dalam kelompok tani tersebut harus menyediakan lahan seluas 2 ha. Hal lainnya yang dilakukan pemda untuk membantu petani adalah mengadakan penyuluhan per kelompok tani.

Hasil yang menggiurkan plus bantuan dari pemda membuat tingginya biaya perawatan bukan

sebagai penghalang bagi masyarakat untuk berkebun kelapa sawit. Ini terbukti dari banyaknya petani yang mengubah lahan pertanian padi dan kakao mereka menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahkan, ada satu areal perkebunan campuran, yaitu pohon kelapa sawit dan kakao.

Keuntungan dari perkebunan kelapa sawit nyatanya juga telah mengubah hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Banyak lahan masyarakat yang tadinya berbentuk hutan kini banyak yang ditebangi dan dibersihkan untuk kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit. Keuntungan secara ekonomi bagi banyak pihak sekaligus kerugian lingkungan karena pengrusakan hutan merupakan paradoks dari perkembangan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan, yang harus dicarikan jalan tengahnya.

Perikanan

Potensi SDA lainnya yang dimanfaatkan oleh penduduk Kabupaten Nunukan adalah perairan laut yang luas. Di kabupaten ini, kegiatan perikanan laut banyak dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Nunukan, dan Kecamatan Sembakung (Syndicate, 2009). Dari perairan laut ini, hasil yang dapat diperoleh sangat bervariasi, misalnya berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan kerang. Produksi dari kegiatan perikanan laut ini cukup menggembirakan karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Data yang dirilis oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan pada tahun 2008 menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan produksi sebesar 3,30% dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu dari 4.088,40 ton pada tahun 2006 menjadi 4.585,36 ton pada tahun 2008 (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan, 2008).

Beberapa hal mengenai subsektor perikanan di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut; *pertama*, masih tradisionalnya alat-alat yang dipakai oleh nelayan di Kabupaten Nunukan untuk mencari ikan di laut, seperti misalnya perahu kecil dan jala. *Kedua*, makelar adalah orang penting yang berfungsi untuk menjual hasil tangkapan nelayan, terutama ke pasar ikan di Tawau-Malaysia. *Ketiga*, penjualan ikan hasil tangkapan ke Tawau dikarenakan pangsa pasar yang besar dan juga harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual di dalam negeri sendiri. *Empat*, buruknya fasilitas menyebabkan belum berkembangnya subsektor perikanan di Kabupaten

Nunukan, misalnya tempat pelelangan ikan terpadu, serta industri pengolahan dan pengawetan ikan. Beberapa hal tersebut menjadi menyebabkan belum optimalnya kontribusi subsektor ini terhadap kesejahteraan hidup nelayan.

Peternakan

Subsektor peternakan adalah salah satu bagian dari sektor pertanian yang nantinya diharapkan dapat menjadi andalan untuk pertumbuhan perekonomian dari Kabupaten Nunukan. Dibandingkan dengan pertanian, perkebunan, dan perikanan; peternakan adalah subsektor yang baru dikembangkan di kabupaten ini. Salah satu alasan untuk mengembangkannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan kedepannya Kabupaten Nunukan tidak lagi mengimpor produk daging ternak dari daerah lain di Indonesia maupun dari negara lain.

Untuk keseluruhan Kabupaten Nunukan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan pada tahun 2008 (2009: 15) diketahui bahwa hewan ternak yang banyak dipelihara oleh rumah tangga adalah ayam buras (53%), sapi potong (11,65%), dan kerbau (9,99%). Penjelasanannya sangat sederhana yaitu perawatan yang mudah bagi ayam buras dibandingkan dengan hewan ternak lainnya. Namun, hewan ternak yang banyak diusahakan bukanlah ayam buras melainkan sapi potong. Dari sekitar 2.480 rumah tangga yang mengusahakan peternakan di Kabupaten Nunukan, ada sekitar 40,77% rumah tangga yang mengusahakan peternakan sapi potong, 22,86% peternakan kerbau, dan 13,75% peternakan ayam buras. Saat ini terdapat 40 peternakan ayam di Kabupaten Nunukan yang tersebar di delapan kecamatan dan telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Subsektor peternakan merupakan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini diakui juga oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Untuk saat ini Kabupaten Nunukan masih mengimpor banyak daging sapi dari daerah lain seperti Surabaya, bahkan dari Tawau. Namun akhir-akhir ini Pemda Kabupaten Nunukan sedang berusaha keras untuk mengembangkan peternakan, khususnya sapi potong dengan alasan kemandirian dan mengurangi ketergantungan.

Berbagai usaha dilakukan oleh Pemda Kabupaten Nunukan dalam mendukung usaha subsektor peternakan, misalnya dengan menyiapkan Rumah Potong Hewan, Tempat Penggemukkan Hewan, *cold storage*, dan menyediakan bibit hewan. Selain itu, Dinas Peternakan Kabupaten Nunukan juga menjalankan beberapa program dalam rangka mengembangkan subsektor peternakan. *Pertama*, mendatangkan bibit-bibit hewan ternak dari Sulawesi. *Kedua*, menjalankan program penggemukan sapi. Untuk saat ini baru ada 25 ekor sapi yang digemukkan selama empat bulan. *Ketiga*, membagi-bagikan sapi untuk dipelihara oleh masyarakat setempat. Bila nanti sapi itu melahirkan anak, anak sapi itu akan diambil dan diberikan kepada masyarakat lain. Bila sang induk sudah melahirkan hingga dua kali maka pemelihara sapi itu berhak mendapatkan induk sapi tersebut.

HAMBATAN DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN NUNUKAN

Pemanfaatan SDA untuk pembangunan ekonomi setempat bukan tanpa halangan. Banyak kendala yang secara kasat mata dapat terlihat dengan jelas. Infrastruktur daerah, industri pengolahan, pupuk dan bibit, sistem irigasi, dan pendidikan adalah beberapa hal yang sekiranya teridentifikasi sebagai hambatan dalam mengembangkan SDA di Kabupaten Nunukan.

Infrastruktur Daerah

Infrastruktur merupakan hal utama yang sangat krusial untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang harus menjadi perhatian utama di Kabupaten Nunukan dalam rangka mengembangkan SDA-nya adalah transportasi, pelabuhan, dan listrik. Transportasi merupakan infrastruktur daerah yang paling esensial karena dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dapat dikatakan bahwa transportasi merupakan akses utama dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Dua macam sistem transportasi terpenting di Kabupaten Nunukan, yaitu transportasi darat (jalan) dan air.

Kondisi jalan di Kota Nunukan, sebagai ibukota Kabupaten Nunukan, dapat dikatakan

sudah tergolong baik dengan telah diaspalnya jalan-jalan di pusat kota. Namun, kondisi yang baik ini belum merata pada semua daerah di kabupaten ini, misalnya saja kondisi jalan di Kecamatan Sebatik. Sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dan tempat terjadinya perdagangan dengan Negara Malaysia, kondisi jalan belum layak. Memang sudah ada beberapa bagian jalan yang diaspal, tetapi banyak juga yang memerlukan perbaikan yang serius. Bila kondisi jalan yang buruk ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan beberapa akibat, misalnya terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena akses jalan sangat berhubungan dengan pengangkutan barang dagangan dari dan keluar daerah. Dengan demikian, banyak alasan bagi para investor untuk tidak datang dan menginvestasikan uangnya di kecamatan tersebut.

Selain transportasi darat, transportasi air juga merupakan satu jenis transportasi yang sangat penting di Kabupaten Nunukan, mengingat kabupaten ini terdiri atas pulau-pulau kecil, seperti Pulau Tarakan dan Pulau Sebatik. Karena tidak adanya sistem transportasi udara, maka transportasi laut merupakan suatu alternatif untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut. Sistem pengangkutan air yang umumnya dipergunakan adalah perahu kecil, yaitu perahu dompen dan perahu tempel, yang sangat bising dan sangat kecil dalam hal kapasitas. Dapat dikatakan bahwa kedua jenis perahu ini tidak lagi layak untuk mengangkut orang banyak atau barang dagangan antarpulau yang melewati laut lepas yang penuh dengan terangan ombak.

Selain transportasi, kendala lain dalam hal infrastruktur yang dihadapi dalam membangun ekonomi daerah melalui pengembangan SDA di Kabupaten Nunukan adalah ketersediaan pelabuhan. Memang telah ada satu pelabuhan besar di Kota Nunukan (Kecamatan Nunukan), yaitu Pelabuhan Tunon Taka yang dipergunakan untuk melayani pengangkutan orang dan barang. Namun, pelabuhan sekelas ini tidak terdapat di kecamatan lain, misalnya Kecamatan Sebatik. Pembangunan pelabuhan hanya baru sampai dalam taraf perencanaan saja. Untuk merealisasikannya mungkin dibutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Yang baru ada di Kecamatan Sebatik ini adalah dermaga-dermaga pelabuhan kecil, baik untuk pengangkutan barang maupun orang. Misalnya dermaga dermaga Sei Nyamuk di Desa Sungai Nyamuk.

Listrik adalah masalah serius lainnya yang dihadapi Kabupaten Nunukan. Di Kota Nunukan sendiri, 'byar-pet' listrik bukanlah hal yang baru. Banyak desa di Kabupaten Nunukan yang baru mendapatkan sambungan listrik pertama kali pada tahun 2004, sedangkan kestabilan listrik baru dapat terealisasi pada bulan September 2009, yaitu setelah adanya penambahan mesin pembangkit listrik dari Banjarmasin. Keberadaan listrik dirasakan sangat penting baik dalam kemajuan suatu daerah secara umum, maupun dalam mengembangkan SDA. Keterkaitan listrik dengan pengembangan SDA adalah listrik dapat menghadirkan industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian. Kehadiran industri pengolahan mutlak membutuhkan listrik karena listrik merupakan generator utamanya.

Industri Pengolahan Modern

Selain infrastruktur, hal lainnya yang menjadi kendala bagi pengembangan SDA di Kabupaten Nunukan adalah keberadaan industri pengolahan modern, terutama industri pengolahan hasil pertanian. Belum tumbuhnya industri pengolahan modern di Kabupaten Nunukan terkendala oleh keterbatasan pasokan listrik sehingga tidak banyak investor yang berminat mendirikan industri pengolahan hasil pertanian. Sebagai contoh adalah belum adanya industri hilir yang mengolah biji kakao kering menjadi produk olahan makanan dan minuman. Hal ini menyebabkan para petani langsung menjual biji kakao kering mereka ke Tawau (Sari, 2009). Nasib yang sama juga dialami oleh biji kelapa sawit. Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dilakukan oleh petani di beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan ke Tawau karena sedikitnya atau bahkan tidak adanya industri pengolahan TBS, khususnya di sentra perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini. Kondisi ini berakibat langsung pada nilai jual produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Sistem Irigasi

Pengairan pada gilirannya juga merupakan satu kendala yang berarti bagi Kabupaten Nunukan dalam mengembangkan SDA yang berbasis pada kegiatan-kegiatan di sektor

pertanian. Selama ini, lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Nunukan hanya mengandalkan sistem pengairan tadah hujan, yaitu pengairan yang sangat bergantung pada curah hujan. Memang, curah hujan di Kabupaten Nunukan sangat tinggi setiap tahunnya, sehingga membuat para petani dan juga pemerintah daerah setempat tidak begitu memperhatikan masalah irigasi. Namun, pentingnya sistem irigasi akan sangat terasa manakala terjadi musim kemarau panjang ditambah dengan perubahan cuaca akibat pemanasan global yang dapat menyebabkan kekeringan.

Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah elemen penting dalam pengembangan SDA di Kabupaten Nunukan. SDM yang handal dapat menggali dan mengelola potensi yang tersimpan dalam alam guna kepentingan hidup masyarakat banyak. Terdapat banyak faktor penentu kualitas SDM, salah satunya adalah pendidikan karena dari sinilah seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bahkan bagi lingkungan di tempat dia tinggal. Oleh karena itu, tidak adanya pendidikan atau pendidikan yang rendah dapat menghambat pengembangan SDA dan juga pembangunan daerah.

Bagaimana dengan Kabupaten Nunukan? Laporan yang dilansir dari Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan pada tahun 2009 menyebutkan bahwa secara umum di kabupaten ini telah terdapat berbagai jenjang pendidikan, yaitu mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Setiap tahun jenjang pendidikan mengalami peningkatan dalam hal kuantitas. Dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain, SD merupakan jenjang pendidikan yang memiliki jumlah murid yang paling banyak, yaitu lebih dari 20.000 orang, diikuti oleh jenjang pendidikan SLTP (5.739 murid), SMU (3.266 murid), dan TK (878 murid). Gambaran lebih detail dapat dilihat pada Diagram 1.

Selain jenjang pendidikan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Kabupaten Nunukan, yaitu Perguruan Tinggi (PT). Disebutkan bahwa pada tahun 2008, di kabupaten ini telah terdapat 3 PT dengan 321 orang mahasiswa dan 42 tenaga pengajar (Bappeda dan BPS, 2009).

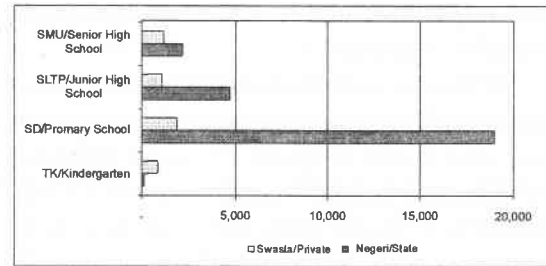


Diagram 1. Jumlah Murid per jenjang Pendidikan di Kabupaten Nunukan, 2008 (Sumber: Bappeda dan BPS, 2009)

Rendahnya jenjang pendidikan berkaitan dengan pengembangan SDA. Pola pikir masyarakat yang masih sederhana tentunya berpengaruh terhadap cara-cara pengelolaan SDA yang dilakukan oleh masyarakat, yang masih tergolong sederhana dan tradisional. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dalam kegiatan pertanian, baik itu pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan, belum maksimal, rendah dalam hal kuantitas dan juga kualitas, dan ramah lingkungan.

SIMPULAN

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang kaya akan potensi SDA, seperti tanah dan laut. Oleh karena itu, pengembangan wilayah melalui kegiatan yang berbasis pada sektor pertanian ini mutlak diperlukan karena dapat berakibat positif pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Mayoritas penduduk di Kabupaten Nunukan telah melakukan kegiatan pertanian untuk kehidupan mereka dan juga pengembangan wilayah. Kegiatan pertanian yang mereka lakukan meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sebenarnya, hasil produk pertanian mereka, sudah cukup baik dan merambah perdagangan internasional karena banyak yang diekspor ke Malaysia. Namun, pengembangan SDA ini terkendala oleh banyak hal, meliputi buruknya infrastruktur seperti transportasi, listrik, dan air bersih; keberadaan industri pengolahan; sistem irigasi; dan rendahnya kualitas SDM. Hambatan-hambatan inilah yang menghalangi dihasilkan produk pertanian yang baik secara kuantitas dan kualitas dari kegiatan pengembangan SDA di Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, hal ini turut pula menghambat

pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Perbaikan pada berbagai kendala tersebut harus menjadi perhatian dan mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Misalnya dalam hal pendidikan, perlu pembangunan sekolah-sekolah, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota. Begitu juga perlu perhatian terhadap kurikulum sekolah yang harus disesuaikan dengan kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Karena kegiatan utama masyarakat adalah pertanian maka diperlukan satu muatan pembelajaran di bidang pertanian. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi, pembukaan fakultas pertanian sangat diperlukan karena akan melahirkan para ahli dan praktisi pertanian yang paham dengan kondisi geografi dan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengembangan SDA dalam rangka pembangunan wilayah akan maju dan sesuai dengan harapan.

Untuk melakukan perbaikan, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam pembangunan wilayah, khususnya dalam pengembangan SDA melalui kegiatan pertanian, antar-pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta lain yang terlibat di dalamnya. Sinergi yang baik antara ketiganya diharapkan akan mengintegrasikan seluruh daya dan upaya untuk mengoptimalkan SDA yang ada di wilayah tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pendekatan pembangunan wilayah yang berorientasikan pada Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Namun, perlu diingat bahwa berbagai hambatan hendaknya dijadikan tantangan bagi semua pihak, khususnya pemerintah daerah setempat untuk kemudian menciptakan alternatif peluang dalam mengelola potensi SDA yang tersedia. Dengan demikian, pengembangan SDA ini dapat dilakukan secara maksimal, menambah nilai jual dari hasil-hasil produk yang dihasilkan, dan tentunya dapat menyejahterakan masyarakat setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. 2009. *Kabupaten Nunukan dalam Angka*. Pemda Kab. Nunukan.
- Bappeda Kabupaten Nunukan. 2009. *Profil Kabupaten Nunukan*. Pemda Kab. Nunukan.
- Borneo Tribune. 2010. 'Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan', diunduh 5 Mei 2010, <http://www.borneotribune.com/pendidikan/strategi-pengembangan-daerah-perbatasan.html>.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. 2009. *Database Potensi Produksi Pertanian Tahun 2009*. Pemda Kab. Nunukan.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. 2008. *Database Potensi Produksi Perkebunan Tahun*. Pemda Kab. Nunukan.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan. 2008. *Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2008*. Pemda Kab. Nunukan.
- Hadi, Suprayoga. 2010. *Program Pembangunan Kawasan Perbatasan*, Diunduh 10 Mei 2010 <http://www.docstoc.com/docs/15745901/Program-Pembangunan-di-Kawasan-Perbatasan>.
- Maunati, Yekti. 2009. *Etnisitas, Pengembangan Sumber Daya Lokal, dan Potensi Perdagangan Internasional dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nunukan-Kalimantan Timur*. Laporan Penelitian Kompetitif, Jakarta: PSDR-LIPI.
- Syndicate, Soegeng Sarjadi. 2009. *Potensi Andalan Kabupaten Nunukan*, diunduh 20 Mei 2010, <http://www.cps-sss.org/web/home/kabupaten/kab/Kabupaten+Nunukan>.